

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus Telp. (0291) 431328
KUDUS 59313**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) tahun 2022 merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Rencana Kerja (Renja) BPPKAD secara normatif disusun untuk memenuhi tahapan dalam penyediaan dokumen perencanaan suatu Perangkat Daerah. Tata cara, sistematika dan substansi penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sebagai bentuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta implementasi dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dengan terbitnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ada keterkaitan SIPD dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah. SIPD adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam upaya untuk memenuhi informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah serta informasi lainnya. Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan

kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan untuk memperbaruinya dengan pengumpulan data secara bertahap dengan mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.

Pada Tahun Anggaran 2021, SIPD sudah digunakan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggarannya. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Rencana Kerja (Renja) BPPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat bahwa Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sebagai dasar acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022 menggunakan SIPD.

Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui hasil capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja PD. Renja BPPKAD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD-BPPKAD bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan sasaran meningkatnya PAD, meningkatnya kualitas keuangan dan aset daerah serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Prioritas peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2022 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran BPPKAD.
2. Penting dan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas BPPKAD yang harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Alokasi anggaran Renja Perangkat Daerah-BPPKAD Tahun 2022 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kriteria yaitu :

1. Mendukung terselenggaranya pemerintahan secara rutin.
2. Mendukung tujuan dan sasaran BPPKAD.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Mendukung dan mempercepat tercapainya target kinerja kegiatan.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dari :

1. Persiapan penyusunan Renja PD
2. Penyusunan rancangan awal Renja PD
3. Penyusunan rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan forum PD/lintas PD
5. Perumusan rancangan akhir Renja PD
6. Penetapan Renja PD

Adapun alur Proses Tahapan Penyusunan Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Alokasi anggaran Renja Perangkat Daerah-BPPKAD Tahun 2022

dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kriteria yaitu :

1. Mendukung terselenggaranya pemerintahan secara rutin.
2. Mendukung tujuan dan sasaran BPPKAD.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Mendukung dan mempercepat tercapainya target kinerja kegiatan.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dari :

1. Persiapan penyusunan Renja PD
2. Penyusunan rancangan awal Renja PD
3. Penyusunan rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan forum PD/lintas PD
5. Perumusan rancangan akhir Renja PD
6. Penetapan Renja PD

Adapun alur Proses Tahapan Penyusunan Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107)

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16)
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3)
31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 23).

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah :

1. Pedoman bagi pelaksana kegiatan BPPKAD Kabupaten Kudus untuk menyusun RKA-SKPD Tahun 2022;
2. Dasar usulan program dan kegiatan BPPKAD Tahun 2022;
3. Memudahkan pengukuran kinerja atau penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
4. Adanya komitmen dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD tahun 2020 dan Capaian Renstra BPPKAD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPKAD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal PD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPPKAD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan serta sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang drinci menurut sumber pendanaannya
- c. Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKAD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, BPPKAD Kabupaten Kudus melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2020 Realisasi Pendapatan BPPKAD sebesar Rp. 156.210.415.763 atau 121,59% dari target anggaran sebesar Rp. 128.468.031.000. Realisasi pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.883.769.643 atau naik sebesar 1,88% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran. 2019 sebesar Rp. 153.326.645.763.

Sedangkan anggaran belanja, BPPKAD melaksanakan 6 program, melalui 16 kegiatan, dengan realisasi belanja TA. 2020 sebesar Rp.18.747.211.340 atau 91,32% dari target anggaran sebesar Rp. 20.529.498.000. Realisasi belanja ini turun sebesar Rp. 1.961.392.886 atau turun sebesar 9,47% dibandingkan realisasi belanja TA. 2019 sebesar Rp. 20.708.604.226. Belanja BPPKAD terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 14.973.091.636 dan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.3.774.119.704. Adapun realisasi belanja yang tidak memenuhi target yaitu :

- a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target keuangan yang direncanakan adalah :
 - Program Penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah untuk Kegiatan Fasilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam (45,51%) karena untuk proses cetaknya tidak tercetak semua, tetapi yang dicetak hanya yang ada perubahannya.

- b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
- Program pelayanan administrasi umum yang meliputi peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja, pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sertapeningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur, yang meliputi kegiatan sarana prasarana aparatur telah memenuhi target yaitu pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.
 - Program Peningkatan Pendapatan Daerah, yang meliputi kegiatan Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah, Fasilitasi penagihan dan penanganan keberatan pajak daerah serta Operasional pengelolaan UPTD pengelola pajak daerah.
 - Program Fasilitasi dan Penyusunan Anggaran Daerah, yang meliputi Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya serta Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
 - Program Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah, yang meliputi Fasilitasi penatausahaan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya serta Fasilitasi penatausahaan dan akuntansi daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam.
 - Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, yang meliputi Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah serta penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD.

- Program Pengelolaan Aset Daerah, yang meliputi Perencanaan dan analisis kebutuhan aset daerah, peningkatan manajemen aset/ barang daerah serta pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Adapun realisasi program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus di Tahun Anggaran 2020 yang melebihi target kinerja adalah Program Peningkatan Pendapatan Daerah. Realisasi Pendapatan BPPKAD sebesar Rp. 156.210.415.406 atau 121,59% dari target anggaran sebesar Rp. 128.468.031.000. Realisasi pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.883.769.643 atau naik sebesar 1,88% dibandingkan realisasi pendapatan TA. 2019 sebesar Rp.153.326.645.763. Realisasi pendapatan dapat melampaui target disebabkan bertambahnya obyek pajak baru, adanya kebijakan reklasifikasi obyek PBB P2 yang ditetapkan dan kesadaran membayar pajak dari wajib pajak dan wajib retribusi.

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja Program Penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah untuk Kegiatan Penyusunan buku sistem dan prosedur akuntansi (45,51%) karena untuk proses cetaknya tidak tercetak semua, tetapi yang dicetak hanya yang ada perubahannya, menyesuaikan kebutuhan.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah , tidak ada justru efisiensi biaya anggaran cetak.
- f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program Penatausahaan dan Akuntansi Daerah, kegiatan penyusunan buku sistem dan prosedur akuntansi lebih cermat dalam perencanaan dan penganggarannya.

Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKAD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020 (tahun berjalan) sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Pencapaian Rencana SKPD s/d Tahun 2020
 Kemampuan Evaluasi Hasil pelaksanaan Rencana RPMPAD dan
 Pencapaian Rencana SKPD s/d Tahun 2021
 Kabupaten Sukoharjo

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (input)	Target Kinerja Capaian program (Rencana SKPD) (Tahun 2016-2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan kegiatan (Kerja SKPD Tahun 2021)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana SKPD s/d (t) 2021	
					Tahun lalu (2020) Target Kerja SKPD tahun 2021 (n-1)	Realisasi Kerja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi capaian program kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.00.4.04.01	Program Pelayanan Administrasi Umum	Intake kegunaan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85	81,5	82	85,1	102,78%			
1.00.4.04.07.01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen PEP yang tersusun sesuai standar	150 dok	29	32 dok	32	100%			
1.1.00.4.04.01.07.02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	125 dok	26	29 dok	29	100%			
1.1.00.4.04.01.07.03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah data (dokumen) Kepegawaian dan administrasi Umum sesuai standar	325 dok	30	53 dok	57	95,38%			
4.04.01.4.04.18	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD	100%	102,58%	100%	102,58%	102,58%			
4.04.01.4.04.18.01	Optimalisasi, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Data realisasi pendapatan daerah OPD pengelola pendapatan (12 OPD)	12 OPD	12	12 OPD	12	100%			
		Data potensi PAD	5 dok	1	1 dok	1	100%			
4.04.01.4.04.18.07	Pendaftaran, pendaftaran dan pemeliharaan data pajak daerah	Data wajib pajak baru (WP)	1.092.700 WP	20.311	297.500 WP	15.232	38%			
		Dokumen pemutakhiran WP	1 dok	1	1 dok	1	100%			
		PAD Pajak Daerah	605.183.967.000	125.763.587.800	114.410.771.000	113.190.000.000	99%			
4.04.01.4.04.18.03	Fasilitas pemagham dan penanganan keberatan pajak daerah	Jumlah putang pajak yang bertagih	600.000.000	7.100.000.000	100.000.000.000	7.400.000.000	6,57%			
		Jumlah penyelesaian aduan keberatan pajak daerah	75 kasus	30	15 kasus	25	167%			
4.04.01.4.04.18.04	Operasional Pengelolaan UPTD Pengelola Pajak Daerah	PAD PBB	121.000.000.000	24.470.000.000	23.150.000.000	21.000.000.000	134%			
		PAD BPHTB	116.050.095.000	29.000.000.000	22.748.000.000	23.000.000.000	101%			
4.04.01.4.04.19	Program fasilitas dan penyusunan anggaran daerah	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%			
4.04.01.4.04.19.01	Fasilitas dan penyusunan anggaran daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	Jumlah dokumen penyusunan anggaran yang tepat waktu	1.130 Dok	228	226	240	106%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.04.01.4.04.20	Facilitas dan penyusunan anggaran daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah dokumen penyusunan anggaran yang tepat waktu	1.170 Dok	726	220	240	100%			
	Program penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%			
4.04.01.4.04.20.01	Facilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya	Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat waktu	40 Dok	8	8 Dok	8	100%			
		Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah	10 Dok	1	2 Dok	1	100%			
4.04.01.4.04.20.02	Facilitas penatausahaan keuangan dan akuntansi daerah bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	Jumlah dokumen penyusunan pertanggungjawaban yang tepat waktu	40 Dok	8	8 Dok	8	100%			
		Jumlah dokumen Perbup Kab. Kudus tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah	10 Dok	1	2 Dok	1	100%			
4.04.01.4.04.21	Program pengelolaan perbendaharaan daerah	Capaian realisasi pembayaran belanja OPD	95%	99,29%	90%	98,29%	100,31%			
4.04.01.4.04.21.01	Facilitas pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah	Jumlah SP2D yang sesuai standar	34.770 SP2D	6.883 SP2D	6.954 SP2D	7.902 SP2D	114%			
		Dokumen laporan (Data Transfer) yang terverifikasi	350 Laporan	77 Laporan	30 Laporan	58 Laporan	82%			
4.04.01.4.04.21.02	Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pengelolaan APBD	Dokumen Perbup tentang petunjuk pelaksanaan APBD	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%			
		Jumlah OPD yang mematuhi juklak APBD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	100%			
4.04.01.4.04.22	Program pengelolaan aset daerah	Persentase Jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	88,13%	80%	88,13%	97,92%			
4.04.01.4.04.22.01	Perencanaan dan analisis kebutuhan aset daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan BPD	5 dok	1 dok	1 dok	2 dok	200%			
		Dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BPD	5 dok	1 dok	1 dok	2 dok	200%			
4.04.01.4.04.22.02	Penggiatan manajemen aset / barang daerah	Jumlah OPD yang melibatkan inventarisasi aset dengan terlibat	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	100%			
4.04.01.4.04.22.03	Pemanfaatan dan penindahragunaan barang milik daerah	Jumlah pemanfaatan aset daerah	2015 Aset	403 Aset	403 Aset	403 Aset	100%			
		Dokumen Apraisal aset/barang daerah	15 Dok	3 Dok	4 Dok	4 Dok	100%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		FAD pemanfaatan aset daerah	213.752.950.000	7.025.000.000	4.267.059.000	10.000.000.000	234,35%			
		Dokumen Perincian pemanfaatan aset	2015 Dok	403 Dok	403 Dok	403 Dok	100%			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)						83 Indeks	Dalam proses	Dalam proses
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15 Dok	8 Dok	53%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rortra dan Reja yang tersusun						3 Dok	2 Dok	67%
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PD yang tersusun						4 Dok	2 Dok	50%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja PD yang tersusun						8 Dok	4 Dok	50%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar						29 Dokumen		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan						74 Orang	74 Orang	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyetoran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima honorarium penanggungjawaban pemecata keuangan						12 Orang	12 Orang	100%
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan						25 Dok	1 Dok	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal						4 Orang		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal						4 Orang		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa pelayanan dan perlengkapan kantor						167 Jenis		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Rector	Jumlah penyediaan alat/bahan listrik						15 jenis	7 Jenis	47%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Bahan/AM Tuis Kantor						87 Jenis	40 Jenis	46%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan alat rumah tangga						35 Jenis	16 Jenis	46%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah minuman pegawai, makanan dan minuman lainnya kantor						14 Jenis	8 Jenis	57%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (bahan cetak)						17 Jenis	8 Jenis	47%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-undangan	Lampiran Jurnis/Surat Kabar/Majalah						4 Jenis	1 Jenis	25%
X.XX.01.2.06.08	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Gaya Perjalanan Dinas Dalam Rector						157 Orang	15 Jenis	10%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah mebel, perlengkapan dan peralatan gedung Kantor						2 Unit		
X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kursi Teras di Ruangan Pejabat								
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Sederajat Lainnya	Jumlah Pengadaan Alat Penyimpan Perencanaan dan Peralatan Kantor						2 Unit		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang						3 Jenis		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Pelayaran	Jumlah penyediaan perangkut dan pencetakan surat						504 Lembar	280 Ltr	35%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi						3 Rencan	3 Renc	100%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHD dan tenaga kontrak						13 orang	13 orang	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Utusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemungjung Utusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						184 Unit		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara						129 Unit	30 unit	23%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelur yang dirawat						15 Unit		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki						10 Unit	5 unit	50%
X.XX.02.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Senam dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Perembaikan dan Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara						30 Jenis	10 unit	33%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan						100 persen		
		capaian realisasi pembayaran belanja PD						95 persen		
		realisasi tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan						100 persen		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah						8 Dok		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS						2 Dokumen		
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Peraturan KUA dan PPAS						2 Dokumen		
5.02.02.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penetapan Kepala Daerah tentang Pengalokasian APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbag APBD						2 Dokumen	1 dok	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembagian (Perubahan) APBD	Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbag APBD						2 Dokumen		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen, SP2D dan laporan pengelolaan perbendaharaan daerah						3 Jenis		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi ke pusat/provins dan Pembinaan Kas Daerah						3 kali	1 kali	33%
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Gribesipasi, Surveilans, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen laporan (Dana Transfer) yang terverifikasi						70 Laporan	25 Lap	36%
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Abstrak Kas, dan Pelaksanaan Pertanggungjawaban/Pemotongan dan Penyeteroran Hartungai Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah SP2D yang sesuai standar						4954 SP2D	1.398 SP2D	27%
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Pecunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Perencanaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Jukdis						1 Dokumen		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah						7 Dok		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen LKPD Kabupaten						1 Dokumen		
5.02.02.2.03.04	Kualifikasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Pemerintah Daerah						1 Dokumen	1 dok	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						3 Dokumen		
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah						1 Dokumen		
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah						1 Dokumen		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban						1 Kali		
5.02.02.2.04	Penyusunan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan bantuan keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil Kabupaten						1 Tahun		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa						1 Tahun		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendadak	Belanja Tak Tertaga						1 Tahun		
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa						1 Tahun		
5.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah						98 persen		
5.02.03.2.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen dokumen pengelolaan barang milik daerah						24 Dok		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen SH, KSH dan AHP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)						3 Dokumen		
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Keabsahan Barang Milik Daerah	Jumlah Draft Standar Belanja dan Standar Keabsahan BMD						1 Dokumen		
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Keabsahan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKSHD						1 Dokumen		
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD						1 Dokumen		
5.02.03.2.01.05	Penetapan/ubah Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penetapan/ubah BMD						6 Laporan	6 lap	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD						6 Laporan		
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan						587 unit	153 unit	26%
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Tamainya BMD						1 Paket	1 paket	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Periodikitas BMD						4 Kali	2 kali	50%
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemertasaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pengoptimalan Penggunaan, Pemertasaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						1 Paket	1 paket	25%
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat Rekonsiliasi Barang Milik Daerah						4 kali		
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD Seperangkat						1 Dokumen		
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah						4 kali		
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase realisasi PAD						100 persen		
5.02.04.2.02	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah						21 Dok		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengembalian pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah						1 Dokumen		
5.02.04.2.01.02	Audit dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen kajian Pajak Daerah						1 Dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah						4 Kali	3 kali	75%
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						1 Paket	-	
5.02.04.2.01.05	Penetapan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah Baru						15000 Objek Pajak	201 OP	1%
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data pajak daerah yang update						1 Unit	-	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek PBB P2 dan BPHTB di Kabupaten Kudus						3 Dokumen	-	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah						30000 Dokumen	-	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelaksanaan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						18000 Kali	4.250 kali	24%
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						5000 Dokumen	-	
5.02.04.2.01.11	Pengalihan Pajak Daerah	Pengalihan Pajak Daerah						1 Laporan	-	
5.02.04.2.01.12	Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah	Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah						20 Dokumen	-	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pelaksanaan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						4 Kali	-	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						3 Kali	-	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus.

Analisis kinerja pelayanan BPPKAD memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan indikator kinerja kunci (IKK) sebagaimana tabel 2.2 terlampir.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Kudus.

Berdasarkan sesuai tugas pokok dan fungsi BPPKAD dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah, isu- isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya kondisi perekonomian akibat dampak covid 19 yang terjadi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mengalami penurunan, karena adanya beberapa kebijakan insentif perpajakan daerah. Penurunan tersebut dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir. Selain itu dari penerimaan retribusi daerah turun drastis (50%) dari target.
- b. Optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi akibat dampak covid 19 guna mendukung kondusivitas sektor usaha.
- c. Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, mengikat dan prioritas. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan upaya refocusing pada program dan kegiatan di OPD-OPD untuk mendukung penguatan perekonomian masyarakat.
- d. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) masih pada tataran perencanaan dan penganggaran, belum sampai ke penstausahaan.
- e. Masih ada beberapa OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan anggaran berbasis kinerja, dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan anggaran menumpuk diakhir tahun.
- f. Keterlambatan OPD dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan OPD harus sudah dikirim kepada Bupati melalui PPKD.
- g. Belum optimalnya pemanfaatan, pendayagunaan dan pengelolaan aset-aset daerah.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus

Analisis kinerja pelayanan BPPKAD memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPPKAD Kabupaten Kudus

No	Indikator	SPM/Standart	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		Nasional		Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2020	Th 2022	Th 2023	
1	2	3	4	7	8	9	9	10	11	12	13
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah			81	82	83	83,5	85,1	83	85	
2	Persentase realisasi target PAD			100%	100%	100%	100%	131,67%	100%	100%	
3	Persentase Masifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Rasio tahapan penyusunan IKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Capaian realisasi pembayaran belanja OPD			90%	90%	95%	95%	100%	95%	95%	
6	Persentase Jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah			90%	90%	90%	90%	99,57%	90%	90%	

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Untuk menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2020 dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada, BPPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Dalam rancangan awal Renja BPPKAD 2022, sebagaimana yang telah tercantum dalam RKPD Tahun 2021, maka direncanakan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 65 sub. kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.986.778.000 sebagaimana tabel 2.3 berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kubu
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 001.000.000.00.0000 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN KEET BAEK
 Sub Unit Organisasi : 001.000.000.000.0000 BAGIAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN KEET DAERAH

Kode	Uraian/ Bidang Uraian Pembelahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Rencana Tahun 2022					Uraian/ Bidang Uraian Pembelahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Rencana Tahun 2022										
			Lokasi (Output Kegiatan)	Target Capaian Kinerja			Page Indikasi (Rp.)			Sumber Dana	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikasi (Rp.)	Sumber Dana				
				Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2			URUSAN PEMUNING URUSAN PEMERINTAHAN					URUSAN PEMUNING URUSAN PEMERINTAHAN												
3	02		KEUANGAN					KEUANGAN												
3	02	01	PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/OTA					PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/OTA												
3	02	01	2.01	Pelayanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Pelayanan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.1 Indeks	1 Dst 1 Dst	01.1 Nilai	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.1 Indeks	4 Dst 3 Dst	01.1 Nilai	21.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.1 Indeks	0 Dst	01.1 Nilai	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.1 Indeks	0 Dst	01.1 Nilai	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Uji dan Tunjangan ASN	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.5 Indeks	71 ASN	01.5 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Uji dan Tunjangan ASN	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.5 Indeks	71 ASN	01.5 Nilai	10.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pembayaran Tunjangan ASN	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.1 Indeks	17 Orang	01.1 Nilai	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Administrasi Pembayaran Tunjangan ASN	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.1 Indeks	17 Orang	01.1 Nilai	147.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	01	2.02	03	Penyusunan Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SPKAD	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.1 Indeks	20 Dst	01.1 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SPKAD	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.1 Indeks	20 Dst	01.1 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	01	2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
1	02	01	2.03	01	Pembinaan dan Peningkatan Pegawai Berprestasi Tunjangan dan Tunjangan	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.5 Indeks	4 Orang	01.5 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembinaan dan Peningkatan Pegawai Berprestasi Tunjangan dan Tunjangan	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.5 Indeks	4 Orang	01.5 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	01	2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah											
1	02	01	2.04	01	Penyediaan Komponen Inti Lokal/Peningkatan Kualitas Kantor	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.5 Indeks	13 Jns	01.5 Nilai	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Komponen Inti Lokal/Peningkatan Kualitas Kantor	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.5 Indeks	13 Jns	01.5 Nilai	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	02	01	2.04	01	Penyediaan Fasilitas dan Perbaikan Kantor	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.5 Indeks	07 Jns	01.5 Nilai	41.710.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Fasilitas dan Perbaikan Kantor	Indeks kemampuan melaksanakan atau lengkap perangkat daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kuala, Derasan	01.5 Indeks	07 Jns	01.5 Nilai	54.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Revisi Kinerja						Revisi Tahun 2022												
		Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
				Program	Belanja Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Program	Keluaran Tahun Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	02	01	206	01	Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	25 Item		1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	25 Item	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	02	01	206	02	Penyediaan Bahan Logistik Dasar	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	14 Item		74.801.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Bahan Logistik Dasar	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	14 Item	74.801.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	02	01	206	03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	17 Item		28.813.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	17 Item	28.813.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	206	04	Penyediaan Bahan Baku dan Pembelian Perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	4 Item		6.488.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Bahan Baku dan Pembelian Perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	4 Item	6.488.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	02	01	206	05	Pemertanggungajaan Kapal Karamandari Komunitas UNO	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Semua Kabupaten/ Kota Dalam Kecamatan, Semua Kelurahan	82,5 Indeks	157 Orang		205.464.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemertanggungajaan Kapal Karamandari dan Komunitas UNO	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Semua Kabupaten/ Kota Dalam Kecamatan, Semua Kelurahan	82,5 Indeks	157 Orang	205.464.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						228.415.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						228.415.000	
7	02	01	207	01	Pengadaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	1 Item		1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	1 Item	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	02	01	207	02	Pengadaan Jasa dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	27 Unit		22.811.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Jasa dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	27 Unit	22.811.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
9	02	01	208		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						218.211.000		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						218.211.000	
10	02	01	208	01	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	364 Lembar		10.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	364 Lembar	10.180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
11	02	01	208	02	Pengadaan Jasa Sambutan, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	1 Paket		17.761.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Jasa Sambutan, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	1 Paket	17.761.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
12	02	01	208	03	Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	11 Orang		83.024.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	11 Orang	83.024.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
13	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						285.218.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						285.218.000	
14	02	01	209	01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Aparatur	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	128 Unit		212.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Aparatur	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah (SPPKAD)	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumean	81,5 Indeks	128 Unit	212.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Garis/ Bidang/ Urutan Pelaksanaan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja					Revisi Tahun 2022					Fungsi Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Garis/ Bidang/ Urutan Pelaksanaan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja					Fungsi Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Program	Kawasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan				Target Capaian Kinerja			Program	Kawasan Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
				Program	Revisi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									Program	Revisi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1.02.01.2.01.01	Pemeriksaan Mutu	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	85,5 Indeks	11 Lini			4.714.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeriksaan Mutu	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	85,5 Indeks	11 Lini			1.104.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
1.02.01.2.01.04	Pemeriksaan Perilaku dan Nilai Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	85,5 Indeks	10 Lini			10.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeriksaan Perilaku dan Nilai Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	85,5 Indeks	10 Lini			10.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
1.02.01.2.01.10	Pemeriksaan/Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	85,5 Indeks	10 Lini			23.804.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeriksaan/Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	85,5 Indeks	10 Lini			41.888.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							1.548.191.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							279.831.173.890						
		persentase kualitas dan kode rekening belajar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			100%						persentase kualitas dan kode rekening belajar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			100%								
		persentase pencapaian anggaran belajar dalam APBD			100%						persentase pencapaian anggaran belajar dalam APBD			100%								
		persentase rata-rata capaian pengelolaan keuangan daerah			100%						persentase rata-rata capaian pengelolaan keuangan daerah			100%								
		persentase pencapaian anggaran			100%						persentase pencapaian anggaran			100%								
3.02.03.2.01	Kemampuan dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							541.417.000	Kemampuan dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							1.117.414.000						
1.02.02.2.01.01	Kemampuan dan Penyusunan RKA dan PPA	persentase kualitas dan kode rekening belajar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	89 persen	2 Duk	100 %			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kemampuan dan Penyusunan RKA dan PPA	persentase kualitas dan kode rekening belajar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	89 persen	2 Duk	100 %			213.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1.02.02.2.01.02	Kemampuan dan Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan PPA	persentase kualitas dan kode rekening belajar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		100 persen	2 Duk	100 %			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kemampuan dan Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan PPA	persentase kualitas dan kode rekening belajar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		100 persen	2 Duk	100 %			170.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1.02.02.2.01.03	Kemampuan dan Penyusunan Perubahan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan APBD	persentase kualitas dan kode rekening belajar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	100 persen	2 Duk	100 %	281.170.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kemampuan dan Penyusunan Perubahan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan APBD	persentase kualitas dan kode rekening belajar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	100 persen	2 Duk	100 %			129.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1.02.02.2.01.04	Kemampuan dan Penyusunan Perubahan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Perubahan APBD	persentase kualitas dan kode rekening belajar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	100 persen	2 Duk	100 %	261.280.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kemampuan dan Penyusunan Perubahan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Perubahan APBD	persentase kualitas dan kode rekening belajar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	100 persen	2 Duk	100 %			254.561.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1.02.03.2.02	Kemampuan dan Pengelolaan Perbandahan Daerah							243.832.000	Kemampuan dan Pengelolaan Perbandahan Daerah							158.206.000						
1.02.03.2.02.01	Kemampuan dan Pengelolaan Nis Daerah	capaian revisi penyusunan belajar PD	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	91 persen	1 Kab	91 %	60.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kemampuan dan Pengelolaan Nis Daerah	capaian revisi penyusunan belajar PD	Kab. Kutub., Kota Kutub., Demas	91 persen	1 Kab	91 %			60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Revisi Tahun 2022						Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Revisi Tahun 2022											
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikator (Rp.)		Sumber Dana	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikator (Rp.)	Sumber Dana				
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Realisasi Kegiatan						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Realisasi Kegiatan						
1	02	02	2.20	05	Kondisi Fasilitas, Kualitas, dan Kelembagaan, Sertifikasi, Monitoring dan Evaluasi, Peningkatan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lain-lain	Capaian nilai pembayaran belanja PD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	75 persen	71 Luaran	95 %	71.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelembagaan, Fasilitas, Asuransi, Kelembagaan, Sertifikasi, Monitoring dan Evaluasi, Peningkatan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lain-lain	Capaian nilai pembayaran belanja PD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	75 persen	71 Luaran	95 %	71.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	02	03	2.02	07	Kondisi dan Penguatan Laporan Keuangan Pemerintah dan Pergeseran Kas Daerah, Laporan Akar Kas, dan Pelaksanaan Perencanaan/Pembiayaan dan Penyelenggaraan Fiskal Setaj	Capaian nilai pembayaran belanja PD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	85 persen	24 Kas ALB4 SP2D	95 %	45.552.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kondisi dan Penguatan Laporan Keuangan Pemerintah dan Penguatan Kelembagaan, Laporan Akar Kas, dan Pelaksanaan Perencanaan/Pembiayaan dan Penyelenggaraan Fiskal Setaj	Capaian nilai pembayaran belanja PD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	85 persen	24 Kas ALB4 SP2D	95 %	45.552.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01	02	02	2.02	10	Penguatan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pemenuhan dan Pengelolaan Kas serta Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Sub Kegiatan	Capaian nilai pembayaran belanja PD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	85 persen	7 Duk 6 Kas	95 %	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pemenuhan dan Pengelolaan Kas serta Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Sub Kegiatan	Capaian nilai pembayaran belanja PD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	85 persen	7 Duk 6 Kas	95 %	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	02	2.02			Kondisi dan Pelaksanaan Anggaran dan Penguatan Keuangan Daerah						761.112.000		Kondisi dan Pelaksanaan Anggaran dan Penguatan Keuangan Daerah						761.112.000	
02	02	2.04	09	Kondisi Penguatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Subunit, Triwulan dan Semester	nilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Duk	100 %	82.288.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kondisi Penguatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Subunit	nilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Duk	100 %	82.288.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
02	02	2.04	04	Emulasi Laporan Keuangan SP2D BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	nilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Duk	100 %	275.811.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kondisi Laporan Keuangan SP2D BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	nilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Duk	100 %	275.811.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
02	02	2.04	05	Kondisi dan Penguatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	nilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Duk	100 %	263.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kondisi dan Penguatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	nilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Duk	100 %	263.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
02	02	2.04	06	Penguatan Kebijakan dan Fasilitas Teknis Operasional Penyelenggaraan Anggaran Pemerintah Daerah	nilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Duk	100 %	11.822.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan Kebijakan dan Fasilitas Teknis Operasional Penyelenggaraan Anggaran Pemerintah Daerah	nilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Duk	100 %	11.822.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Unitas/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (Re Program/ Kegiatan)				Indikator Kinerja		Revisi Tahun 2022					Dinas/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (Re Program/ Kegiatan)		Indikator Kinerja		Revisi Tahun 2022							
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikatif (Rp.)					Sumber Dana	Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	02	02		14	Pengadaan Sistem dan Peralatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	baik layanan penyusunan LFPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	100 persen	1 Duk	100 %	18.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengadaan Sistem dan Peralatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	baik layanan penyusunan LFPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	100 persen	1 Duk	100 %	18.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4	02	02		15	Peningkatan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	baik layanan penyusunan LFPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	100 persen	1 Duk	100 %	11.810.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	baik layanan penyusunan LFPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	100 persen	1 Duk	100 %	11.810.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
5	02	02		204	Peningkatan Usaha Kesejahteraan Pengkayaan Kawasan Daerah						0		Peningkatan Usaha Kesejahteraan Pengkayaan Kawasan Daerah							276.000.780.000			
5	02	02		204	00	Aktivitas Pemukiman dan Penyediaan Sarana Kawasan	baik layanan penyusunan LFPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aktivitas Pemukiman dan Penyediaan Sarana Kawasan	baik layanan penyusunan LFPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun			251.874.332.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	02	02		204	01	Pengembangan Dana Daerah dan Mandiri	baik layanan penyusunan LFPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Dana Daerah dan Mandiri	baik layanan penyusunan LFPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun			2.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	02	02		204	10	Pengembangan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	baik layanan penyusunan LFPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	baik layanan penyusunan LFPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan, Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Tahun			400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN SARANG MILIK DASAR						485.850.000		PROGRAM PENGELOLAAN SARANG MILIK DASAR							607.888.889			
5	02	03		201	Pengelolaan Sarang Milik Daerah						442.850.000		Pengelolaan Sarang Milik Daerah								517.888.000		
5	02	03		201	01	Pengelolaan Sarang Milik	Pemertaa jumlah sarang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	90 persen	1 Duk	90 %	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelolaan Sarang Milik	Pemertaa jumlah sarang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	90 persen	1 Duk	90 %		60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	02	03		201	02	Pengelolaan Sarang Milik	Pemertaa jumlah sarang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	90 persen	1 Duk	90 %	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelolaan Sarang Milik	Pemertaa jumlah sarang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	90 persen	1 Duk	90 %		20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	02	03		201	03	Pengelolaan Sarang Milik	Pemertaa jumlah sarang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	90 persen	1 Duk	90 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelolaan Sarang Milik	Pemertaa jumlah sarang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	90 persen	1 Duk	90 %		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	02	03		201	04	Pengelolaan Sarang Milik	Pemertaa jumlah sarang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	90 persen	1 Duk	90 %	10.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengelolaan Sarang Milik	Pemertaa jumlah sarang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kubu, Kota Kubu, Dumaikan	90 persen	1 Duk	90 %		10.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Unitas/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan					Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022				Unitas/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikasi (Rp.)			Sumber Dana	Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikasi (Rp.)	Sumber Dana
								Program	Estimasi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Estimasi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	02	03	2.21	01	Peningkatan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Semua Kelurahan	80 person	4 Laporan	90 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Semua Kelurahan	80 person	4 Laporan	90 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	03	2.21	02	Peningkatan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	80 person	4 Laporan	90 %	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	80 person	4 Laporan	90 %	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	02	03	2.21	03	Peningkatan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 person	30 Perambatan	90 %	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 person	30 Perambatan	90 %	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6	02	03	2.21	04	Peningkatan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 person	1 Paket	90 %	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 person	1 Paket	90 %	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	02	03	2.21	05	Peningkatan dan Penguatan Pengelolaan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 person	4 Kali	90 %	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan dan Penguatan Pengelolaan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 person	4 Kali	90 %	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	02	03	2.21	10	Optimalisasi Pengawasan, Pembinaan, Perambatan, dan Pengawasan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	80 person	14 Duk	90 %	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Pengawasan, Pembinaan, Perambatan, dan Pengawasan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	80 person	14 Duk	90 %	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
9	02	03	2.21	11	Rakor/evaluasi dalam rangka Penyusunan Laporan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	80 person	4 Kali	90 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rakor/evaluasi dalam rangka Penyusunan Laporan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	80 person	4 Kali	90 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
10	02	03	2.21	12	Penyusunan Laporan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	80 person	1 Duk	90 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Laporan Ruang MMB Daerah	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	80 person	1 Duk	90 %	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
11	02	03	2.21	13	Pembinaan Pengelolaan Ruang MMB Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	80 person	4 Kali	90 %	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembinaan Pengelolaan Ruang MMB Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah korbet audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	80 person	4 Kali	90 %	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
12	02	04	2.21		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						1.225.124.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1.225.124.000	
13	02	04	2.21		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						1.225.124.000	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah									1.225.124.000
14	02	04	2.21	01	Penerbitan pengiklilan pajak daerah	penerbitan walikel PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	1 Duk		25.430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penerbitan pengiklilan pajak daerah	penerbitan walikel PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	1 Duk		25.430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
15	02	04	2.21	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	penerbitan walikel PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	1 Duk		11.841.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	penerbitan walikel PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	1 Duk		11.841.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
16	02	04	2.21	03	Penyediaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pajak Daerah	penerbitan walikel PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	4 Kali		24.643.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pajak Daerah	penerbitan walikel PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	4 Kali		24.643.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Rencana Tahun 2012					Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Rencana Tahun 2012					
					Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikator (Rp.)	Sumber Dana	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikator (Rp.)	Sumber Dana		
							Program	Volume/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Program	Volume/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	02	04	201	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengiriman Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Paket		14.251.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengiriman Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Paket		14.251.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	02	04	201	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	11 Objek Pajak		17.007.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	11 Objek Pajak		17.007.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	02	04	201	06	Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Sisa Cukai Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Unit		41.671.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Sisa Cukai Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Unit		41.671.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	04	201	07	Pelaksanaan Fungsi dan Perbaikan (PMBPT) serta Bina Persewaan dan Tanah dan Bangunan (PMBPT)	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	3 Dik		4.363.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan Fungsi dan Perbaikan (PMBPT) serta Bina Persewaan dan Tanah dan Bangunan	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	3 Dik		4.363.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5	02	04	201	08	Pemetaan Wilayah Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	100.000 Dik		101.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemetaan Wilayah Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	100.000 Dik		101.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6	02	04	201	09	Pelayanan dan Pemeliharaan Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	10.000 Kst		24.177.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelayanan dan Pemeliharaan Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	10.000 Kst		24.177.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	02	04	201	10	Pendataan dan Verifikasi Data Pengiriman Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Dik		4.252.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pendataan dan Verifikasi Data Pengiriman Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Dik		4.252.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	02	04	201	11	Pengalihan Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Laporan		307.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengalihan Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	1 Laporan		307.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9	02	04	201	12	Pemeliharaan Fasilitas Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	20 Dikumen		4.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Fasilitas Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	20 Dikumen		4.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10	02	04	201	13	Pengembangan Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	4 Kst		191.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	4 Kst		191.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11	02	04	201	14	Pendataan dan Pengembangan Pengiriman Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	3 Kst		1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pendataan dan Pengembangan Pengiriman Pajak Daerah	persentase realisasi PAD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 persen	3 Kst		1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TOTAL											3.941.000.000								3.941.000.000	

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NILAI				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Kebijakan terhadap Nasional

Untuk meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup masyarakat Indonesia di berbagai bidang dan sektor secara berkelanjutan dengan tetap, mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumberdaya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (propenas) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah untuk melaksanakan kewenangannya yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan,, pekerjaan umum, penataan ruang, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan di daerah, Kabupaten Kudus menyusun RPJMD dengan mengacu RPJMN. Pemerintah Kabupaten Kudus juga menyusun RKPD setiap tahun yang dijabarkan oleh seluruh Perangkat daerah. Seluruh Perangkat daerah menyusun Renja-PD sehingga terjalin hubungan keselarasan dari proses perencanaan program kegiatan dan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan dengan tetap berpedoman kepada Kebijakan Nasional, sebagaimana tabel berikut :

Tabel Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	APBN	
2	Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	APBN	
3	Kapasitas Keuangan Daerah	APBN	
4	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	APBN	

Berdasarkan keempat Kebijakan Nasional tersebut, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus mengacu kepada "Kapabilitas Keuangan Daerah". Secara umum, prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan. Namun, masih diperlukan sistem dan mekanisme yang efektif untuk implementasi program-program pembangunan secara terpadu dan terarah.

Sebagai kelanjutan dari capaian yang telah diperoleh dan permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan pembangunan berkelanjutan tahun 2022 adalah :

- 1) Menjabarkan secara konkrit unsur-unsur pembangunan dan pola hubungan untuk memastikan berbagai pemangku kepentingan dan mempercepat internalisasi prinsip pembangunan.
- 2) Menyepakati ukuran-ukuran yang tepat sehingga pembangunan berkelanjutan dapat berjalan nyata.

Prioritas pembangunan nasional meliputi 11 yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dan 3 prioritas lainnya. Prioritas tersebut dijabarkan ke dalam berbagai sasaran dan kebijakan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi tugas dan pokok fungsi BPPKAD ada lima yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan operasional pendapatan daerah, anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, perbendaharaan, otorisasi dan pembiayaan, akuntansi, pembukuan,

- pembinaan dan manajemen keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah;
- 5) Pamantsuan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
 - 6) Pelaksanaan kesekretariatan Badan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPPKAD

Berdasarkan Visi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Periode Tahun 2018-2023 yaitu **"KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODEREN, RELEGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA"**, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
- 3) Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
- 4) Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah diatas, BPPKAD melaksanakan **misi kedua yaitu mewujudkan pemerintahan yang handal untuk peningkatan pelayanan publik**. BPPKAD melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam mengelola keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan dan belanja di era pandemi covid-19, belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib, rutin, serta pada upaya pemulihan pandemi covid-19 antara lain pemulihan industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem jaringan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sedangkan di bidang pendapatan melakukan optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja BPPKAD Tahun 2022 adalah :

"Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah"

Sedangkan sasaran rencana kerja yang akan diwujudkan pada tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan PAD
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

a. **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah. BPPKAD dalam melaksanakan kewenangannya melaksanakan kebijakan daerah dibidang keuangan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan BPPKAD dalam merumuskan program dan kegiatan disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPPKAD, juga mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Renstra BPPKAD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2022.

b. **Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

BPPKAD melaksanakan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan dengan Rencana program dan kegiatan BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022 adalah terdiri dari 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub.kegiatan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

Indikator dan target kinerja rencana program dan kegiatan pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Ruda
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.02.2.01.00.0000 BAGIAN PENGELOLAAN PERDIKATAN, KEJARAN DAN ASST DASRAH
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.00.00.00.0000 BAGIAN PENGELOLAAN PENDIKATAN, KEJARAN DAN ASST DASRAH

Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Revisi Tahun 2022							Eselon Peringkat	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Revisi Tahun 2022						
		Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikasi (Rp.)	Sumber Dana			Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikasi (Rp.)	Sumber Dana
				Program	Kategori Sub Kegiatan	Rinc. Kegiatan							Program	Kategori Sub Kegiatan	Rinc. Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	URUSAN PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN									URUSAN PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN							
1.02	KEJARAN						975.873.390.443			KEJARAN						4.594.776.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MELALUI KABUPATEN/KOTA						13.539.175.357			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MELALUI KABUPATEN/KOTA						1.369.998.000	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Urusan Peringkat Daerah						35.189.206			Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Urusan Peringkat Daerah						27.899.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	4.000	3.000	25.180.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	4.000	3.000	41.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.01.02	Yakult. Kerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	2.000	01.1.0000	11.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Yakult. Kerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	2.000	01.1.0000	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.458.265.189			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						64.280.000	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Cap dan Tunjangan ASN	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	75.000	01.1.0000	18.301.142.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Cap dan Tunjangan ASN	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	75.000	01.1.0000	18.301.142.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Pelayanan Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	12.000	01.1.0000	147.261.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Pelayanan Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	12.000	01.1.0000	147.261.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penastanaan dan Pengoper/Ventura Keuangan APBD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	29.000	01.1.0000	1.300.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaksanaan Penastanaan dan Pengoper/Ventura Keuangan APBD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	29.000	01.1.0000	1.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000	
1.02.01.2.03.01	Penyediaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	4.000	01.1.0000	10.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	4.000	01.1.0000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah						282.853.287			Administrasi Umum Perangkat Daerah						88.000.000	
1.02.01.2.04.01	Penyediaan Sarung Prasarana (Listrik/Penerangan/Kebersihan/Kantor)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	15.000		2.500.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Sarung Prasarana (Listrik/Penerangan/Kebersihan/Kantor)	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	15.000		2.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.04.02	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	87.000		84.200.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (IPPKAD)	Kab. Kuala, Kota Kuala, Deraan	01.1.0000	87.000		84.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Urutan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022					Catatan	Urutan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023						
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page In/Out (Rp.)				Sumber Dana	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page In/Out (Rp.)	Sumber Dana
				Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Kategori Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	02 01 2.04 01	Penyediaan Fasilitas Pemilih Tetap	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.1 Indeks	35 item	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Fasilitas Pemilih Tetap	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.2 Indeks	35 item	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2	02 01 2.04 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	14 item	44.101.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	14 item	44.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3	02 01 2.04 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	17 item	24.275.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	17 item	23.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
4	02 01 2.04 06	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	4 item	4.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Perundang-undangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	4 item	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
5	02 01 2.04 09	Pemeliharaan Rapor Komunitas dan Komunitas LURD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Demas Kabupaten/Kota, Demas Kecamatan, Demas Kelurahan	82.3 Indeks	117 Orang	11.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Rapor Komunitas dan Komunitas LURD	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Demas Kabupaten/Kota, Demas Kecamatan, Demas Kelurahan	82.3 Indeks	117 Orang	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
6	02 01 2.07	Penyediaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.271.000		Penyediaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.000.000			
7	02 01 2.07 05	Penyediaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
8	02 01 2.07 10	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	3 Unit	27.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	3 Unit	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
9	02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					430.283.272		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000			
10	02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Jasa Penyusutan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	100 Lembar	10.940.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Jasa Penyusutan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	100 Lembar	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
11	02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumbat Daya dan Listrik	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	3 Arloji	21.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumbat Daya dan Listrik	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	3 Arloji	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
12	02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	11 Orang	400.440.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	11 Orang	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
13	02 01 2.08	Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					213.782.000		Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000			
14	02 01 2.08 08	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Rapor Komunitas, Pjkt, dan Perlengkapan Komunitas dan Lapangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	177 Item	82.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Rapor Komunitas, Pjkt, dan Perlengkapan Komunitas dan Lapangan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	175 Item	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
15	02 01 2.08 09	Pemeliharaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	11 Item	1.504.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemeliharaan Mebel	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja penyelenggara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	82.3 Indeks	11 Item	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

Kode	Uraian/ Bidang Urutan Pelaksanaan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Revisi Tahun 2022					Catatan Penting	Uraian/ Bidang Urutan Pelaksanaan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Revisi Tahun 2022								
			Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Capaian Program	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Program	Revisi Sub Kegiatan	Revisi Kegiatan								Program	Revisi Sub Kegiatan	Revisi Kegiatan		
1.02.01.2.00.00	Peningkatan Fasilitas dan Mutu Layanan	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan perantara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	XXI Indeks	10000		79.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Peningkatan Fasilitas dan Mutu Layanan	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan perantara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	XXI Indeks	10000		79.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			
1.02.01.2.00.01	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan perantara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	XXI Indeks	21344		41.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan perantara daerah (SPPKAD)	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	XXI Indeks	20.000		41.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						279.872.102.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						2.124.880.000					
	penertakan manfaat dari kode rekening belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			100%								100%							
	penertakan pengalihan anggaran belanja dalam APBD			100%								100%							
	penertakan re-ale anggaran pengalihan anggaran daerah			100%								100%							
	penertakan pemertakan anggaran			100%								100%							
5.02.03.2.01	Kontribusi dan Peningkatan Kinerja Anggaran Daerah						1.117.414.880	Kontribusi dan Peningkatan Kinerja Anggaran Daerah						378.148.000					
1.02.02.2.01.01	Kontribusi dan Peningkatan RUP dan PPAJ	penertakan Manfaat dari kode rekening belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	100 persen	2 Duk	100 %	2.113.7000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kontribusi dan Peningkatan RUP dan PPAJ	penertakan Manfaat dari kode rekening belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	100 persen	2 Duk	100 %		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			
1.02.02.2.01.02	Kontribusi dan Peningkatan Perubahan RUP dan Perubahan PPAJ	penertakan Manfaat dari kode rekening belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		100 persen	2 Duk	100 %	2.047.0000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kontribusi dan Peningkatan Perubahan RUP dan Perubahan PPAJ	penertakan Manfaat dari kode rekening belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		100 persen	2 Duk	100 %		PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			
3.02.02.2.01.03	Kontribusi dan Peningkatan Perubahan Daerah tentang APBD dan Perubahan Output Daerah tentang Penjabaran APBD	penertakan Manfaat dari kode rekening belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	100 persen	2 Duk	100 %	175.048.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kontribusi dan Peningkatan Perubahan Daerah tentang APBD dan Perubahan Output Daerah tentang Penjabaran APBD	penertakan Manfaat dari kode rekening belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	100 persen	2 Duk	100 %	307.410.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			
5.02.02.2.01.04	Kontribusi dan Peningkatan Perubahan APBD dan Perubahan Output Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	penertakan Manfaat dari kode rekening belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	100 persen	2 Duk	100 %	254.541.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kontribusi dan Peningkatan Perubahan APBD dan Perubahan Output Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	penertakan Manfaat dari kode rekening belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	100 persen	2 Duk	100 %	307.288.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			
5.02.02.2.02	Kontribusi dan Peningkatan Perencanaan Daerah						158.200.000	Kontribusi dan Peningkatan Perencanaan Daerah						208.914.000					
1.02.02.2.02.01	Kontribusi dan Peningkatan Kap Daerah	capaian realisasi perencanaan belanja PD	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	70 persen	3 Kab	70 %	40.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kontribusi dan Peningkatan Kap Daerah	capaian realisasi perencanaan belanja PD	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	70 persen	3 Kab	70 %	44.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			
5.02.02.2.02.01	Kontribusi Fasilitas, Aset, Sistem, Sertifikasi, Mutu, dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Dana Transfer Lainnya	capaian realisasi perencanaan belanja PD	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	75 persen	10 Laporan	75 %	15.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kontribusi Fasilitas, Aset, Sistem, Sertifikasi, Mutu, dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Dana Transfer Lainnya	capaian realisasi perencanaan belanja PD	Kab. Kutub., Kota Kutub., Cirebon	75 persen	10 Laporan	75 %	15.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			

Kode	Uraian/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Uraian/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Rencana Tahun 2023								
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikator (Rp.)				Sumber Dana	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikator (Rp.)	Sumber Dana		
				Program	Relevansi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Relevansi Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
02	02	1.02	01	Keefektifan dan Peningkatan Layanan Publik Pemukiman dan Pengaturan Klt Daerah, Layanan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Perolehan dan Penyaluran Perimbangan Keuangan (P4K)	Capaian realisasi pembayaran Saluran PD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	20 person	24 Kali 4.934.57011	85 %	21.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Keefektifan dan Peningkatan Layanan Publik Pemukiman dan Pengaturan Klt Daerah, Layanan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Perolehan dan Penyaluran Perimbangan Keuangan (P4K)	Capaian realisasi pembayaran Saluran PD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	20 person	24 Kali 4.934.57011	85 %	21.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
02	02	1.02	10	Pengadaan Perangkat Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pembiayaan dan Pengaturan Kas serta Pelaksanaan dan Pelaksanaan/Perolehan Sub Kegiatan	Capaian realisasi pembayaran Saluran PD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	05 person	7 Kali 1.543	95 %	25.990.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Pengadaan Perangkat Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pembiayaan dan Pengaturan Kas serta Pelaksanaan dan Pelaksanaan/Perolehan Sub Kegiatan	Capaian realisasi pembayaran Saluran PD	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	05 person	7 Kali 1.543	95 %	25.990.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
02	02	1.02		Keefektifan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						Keefektifan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						164.344.000			
02	02	1.02	03	Kemampuan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Subunit Pelaksanaan dan Pelaksanaan	Realisasi laporan keuangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	1 Kali	100 %	46.108.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kemampuan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Subunit Pelaksanaan dan Pelaksanaan	Realisasi laporan keuangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	1 Kali	100 %	46.108.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
02	02	1.02	04	Kemampuan Laporan Keuangan APBD, APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Realisasi laporan keuangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	1 Kali	100 %	227.811.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kemampuan Laporan Keuangan APBD, APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Realisasi laporan keuangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	1 Kali	100 %	227.811.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
02	02	1.02	05	Kemampuan dan Peningkatan Kemampuan Pelaporan Daerah yang bertanggung jawab dan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten Pelaporan Keuangan Daerah tentang Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Realisasi laporan keuangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	2 Kali	100 %	270.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Kemampuan dan Peningkatan Kemampuan Pelaporan Daerah yang bertanggung jawab dan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten Pelaporan Keuangan Daerah tentang Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Realisasi laporan keuangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	2 Kali	100 %	270.000.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
02	02	1.02	09	Pengadaan Perangkat dan Fasilitas Teknis Administrasi Pertanggungjawaban Akuntansi Pemerintahan Daerah	Realisasi laporan keuangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	05 person	1 Kali	100 %	15.622.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Pengadaan Perangkat dan Fasilitas Teknis Administrasi Pertanggungjawaban Akuntansi Pemerintahan Daerah	Realisasi laporan keuangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	05 person	1 Kali	100 %	15.622.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)
02	02	1.02	10	Pengadaan Sistem dan Fasilitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Realisasi laporan keuangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	1 Kali	100 %	46.108.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Pengadaan Sistem dan Fasilitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Realisasi laporan keuangan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutub, Kota Kutub, Demas	100 person	1 Kali	100 %	46.108.000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)

Kode	Uraian/ Bidang Urutan Penyelenggaraan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja		Revisi Tahun 2022					Luaran	Uraian/ Bidang Urutan Penyelenggaraan Daerah dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja		Revisi Tahun 2023							
							Tipe Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)						Sumber Dana	Capaian Program	Tipe Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
								Program	Berkas Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
02	02	2.03	11	Pembinaan Masyarakat Kelapa Sawit dan Peningkatan Perikanan Perikanan Kelapa Sawit	Hasil kegiatan penyusunan LPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	02 orang	1 Kali	100%		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembinaan Masyarakat Kelapa Sawit dan Peningkatan Perikanan Perikanan Kelapa Sawit	Hasil kegiatan penyusunan LPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	02 orang	1 Kali	100%	11.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
02	02	2.04	08	Pengembangan Dana Desa dan Mendesa	Hasil kegiatan penyusunan LPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran, Semau Kelurahan	08 orang	1 Tahun		2.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Dana Desa dan Mendesa	Hasil kegiatan penyusunan LPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran, Semau Kelurahan	08 orang	1 Tahun			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
02	02	2.04	09	Pengembangan Dana Desa dan Mendesa	Hasil kegiatan penyusunan LPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran, Semau Kelurahan	09 orang	1 Tahun		40.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Dana Desa dan Mendesa	Hasil kegiatan penyusunan LPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran, Semau Kelurahan	09 orang	1 Tahun			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
02	02	2.04	10	Pengembangan Dana Desa dan Mendesa	Hasil kegiatan penyusunan LPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran, Semau Kelurahan	10 orang	1 Tahun		40.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengembangan Dana Desa dan Mendesa	Hasil kegiatan penyusunan LPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran, Semau Kelurahan	10 orang	1 Tahun			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
02	03			PROGRAM PENGELOLAAN SARANAS MILIK DAERAH									PROGRAM PENGELOLAAN SARANAS MILIK DAERAH											
02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah									Pengelolaan Barang Milik Daerah											
02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	01 orang	1 Kali	95%	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Standar Harga	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	01 orang	1 Kali	95%	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Harga	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	02 orang	1 Kali	95%	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Standar Harga	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	02 orang	1 Kali	95%	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
02	03	2.01	03	Penyusunan Pemertaaan Kelengkapan Barang Milik Daerah	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	03 orang	1 Kali	95%	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Pemertaaan Kelengkapan Barang Milik Daerah	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	03 orang	1 Kali	95%	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
02	03	2.01	04	Penyusunan Kelengkapan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	04 orang	1 Kali	95%	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Kelengkapan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	04 orang	1 Kali	95%	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
02	04	2.01	06	Pemertaaan Barang Milik Daerah	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Semau Kelurahan	06 orang	6 Laporan	90%	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemertaaan Barang Milik Daerah	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Semau Kelurahan	06 orang	6 Laporan	90%	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
02	04	2.01	08	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	08 orang	8 Laporan	95%	5.881.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemertaa jumlah barang audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutai, Kota Kuala, Damaran	08 orang	8 Laporan	95%	5.881.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					

Kode	Uraian/ Rincian Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Revisi Tahun 2023					Catatan Penting	Uraian/ Rincian Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Revisi Tahun 2023								
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				Sumbangan Dana	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbangan Dana		
				Program	Kelompok Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							Program	Kelompok Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
5	02 01 2 01 01	Pengawasan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub Sumarta, Kecamatan, Demesa Kabupaten	50 person	20	Persentuaian an	90 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengawasan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub Sumarta, Kecamatan, Demesa Kabupaten	50 person	20	Persentuaian an	90 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6	02 03 2 01 02	Pemantauan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub Sumarta, Kecamatan, Demesa Kabupaten	50 person	1 Paket		90 %	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantauan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub Sumarta, Kecamatan, Demesa Kabupaten	50 person	1 Paket		90 %	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	02 03 2 01 03	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub Sumarta, Kecamatan, Demesa Kabupaten	50 person	4 sub		90 %	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub Sumarta, Kecamatan, Demesa Kabupaten	50 person	4 sub		90 %	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	03 2 01 04	Optimalisasi Penggunaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	50 person	14 sub		90 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Optimalisasi Penggunaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	50 person	14 sub		90 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	03 2 01 11	Rekrutmen dalam rangka Penyusunan Laporan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	50 person	4 sub		90 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rekrutmen dalam rangka Penyusunan Laporan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	50 person	4 sub		90 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	03 2 01 12	Penyusunan Laporan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	50 person	1 sub		90 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan Laporan Bidang M&A Daerah	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	50 person	1 sub		90 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	03 2 01 13	Pemantauan Penyelenggaraan Bidang M&A Daerah Pemerintah Kabupaten	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	50 person	4 sub		90 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantauan Penyelenggaraan Bidang M&A Daerah Pemerintah Kabupaten	Peningkatan jumlah kantor audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	50 person	4 sub		90 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
									1.225.224.888									1.225.224.888	
02	04 2 01	Regulasi Pengelolaan pendapatan Daerah										Regulasi Pengelolaan pendapatan Daerah							
									1.225.224.888									1.225.224.888	
02	04 2 01 01	Pemantauan pengelolaan pajak Daerah	penertakan melalui PAD	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	100 person	1 sub			1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantauan pengelolaan pajak Daerah	penertakan melalui PAD	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	100 person	1 sub			1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	04 2 01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	penertakan melalui PAD	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	100 person	1 sub			5.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	penertakan melalui PAD	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	100 person	1 sub			5.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	04 2 01 03	Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah	penertakan melalui PAD	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	100 person	4 sub			11.740.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyusunan dan Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah	penertakan melalui PAD	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	100 person	4 sub			11.740.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
02	04 2 01 04	Penelitian Serta dan Pasca Penyelidikan Pajak Daerah	penertakan melalui PAD	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	100 person	1 Paket			15.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penelitian Serta dan Pasca Penyelidikan Pajak Daerah	penertakan melalui PAD	Kab. Kutub, Kota Sukoh, Demesa	100 person	1 Paket			15.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2017					Catatan	Maksud Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2017								
						Capaian Program	Lokasi/ Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Page Indikasi (Rp.)	Sumber Dana	Capaian Program	Lokasi/ Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Page Indikasi (Rp.)	Sumber Dana
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5.02.04.2.01.05	Pembinaan dan Penertiban Objek Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	11 Objek Pajak	71.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembinaan dan Penertiban Objek Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	11 Objek Pajak	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.06	Pengalihan, Penertiban, dan Penghapusan Sisa Data Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Kota Kutub. Demas	100 persen	1 Hal	63.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengalihan, Penertiban, dan Penghapusan Sisa Data Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Kota Kutub. Demas	100 persen	1 Hal	63.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Pertambahan Nilai atas Tanah dan Bangunan (PPNBT)	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Duk	7.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Pertambahan Nilai atas Tanah dan Bangunan	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Duk	5.111.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.08	Penyempurnaan Objek Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Kota Kutub. Demas	100 persen	800.000 Duk	180.272.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyempurnaan Objek Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Kota Kutub. Demas	100 persen	800.000 Duk	182.917.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.09	Pengalihan dan Konversi Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Kota Kutub. Demas	100 persen	1.000 Cal	28.441.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengalihan dan Konversi Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Kota Kutub. Demas	100 persen	1.000 Cal	28.396.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.10	Penertiban dan Penilaian Data Pelaporan Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Kota Kutub. Demas	100 persen	1 Duk	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penertiban dan Penilaian Data Pelaporan Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Kota Kutub. Demas	100 persen	1 Duk	4.911.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.11	Pengalihan Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Demas Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Lahan	652.414.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengalihan Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Demas Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Lahan	652.714.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.12	Penyempurnaan Aspek-aspek Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Kota Kutub. Demas	100 persen	20 Dukuman	4.184.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penyempurnaan Aspek-aspek Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Kota Kutub. Demas	100 persen	20 Dukuman	3.639.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.13	Pengalihan, Penertiban dan Penghapusan Sisa Data Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Cal	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengalihan, Penertiban dan Penghapusan Sisa Data Pajak Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Cal	99.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
5.02.04.2.01.14	Penertiban dan Penghapusan Pengalihan Reklame/ Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Cal	7.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penertiban dan Penghapusan Pengalihan Reklame/ Daerah	penertiban wilayah PAD	Kab. Kutub. Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Cal	5.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
TOTAL						281.015.310.441								4.882.272.000								

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Data Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

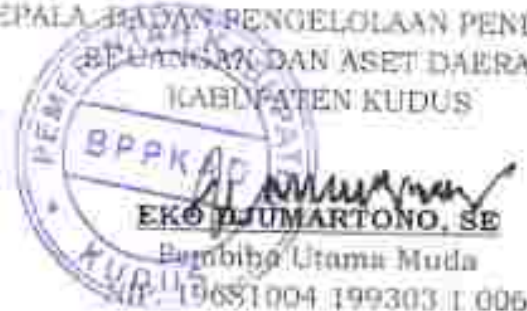
Rencana Kerja (Renja) BPPKAD memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran.

Renja BPPKAD Tahun 2022 ikut serta mendukung mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kudus Tahun 2016-2023 yang merupakan implementasi tahun keempat visi Bupati Kudus yaitu "Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera" serta melaksanakan misi kedua "mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik". Pada Tahun 2022 Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merencanakan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 301.015.330.445, dengan rincian Rp. 278.000.793.000 untuk penyaluran bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil kab/kota serta Rp.23.014.537.445 untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 yang ada ini masih jauh dari sempurna, dan membutuhkan kritik dan saran yang dapat membantu penyempurnaannya di masa datang. Terlepas dari itu semua, kami juga berharap bahwa seluruh program kerja yang ada dalam Rencana Kerja ini akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

Kudus, 30 Juli 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
BUDAYA DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS



EKO JUMARTONO, SE
Pengelola Utama Muda
NIP. 19681004 199303 1 006